



ISSN 2085-9678

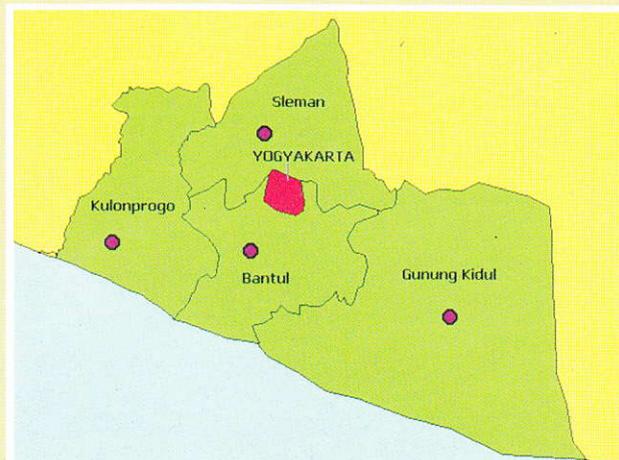
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DIY BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

JURNAL 4

Penelitian dan Pengembangan

Volume III, Nomor 4, Tahun 2011

- * PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS OPEN SOURCE UNTUK PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI YOGYAKARTA
- * PENGEMBANGAN MODEL PENYIAPAN DAN PENJAMINAN MUTU GURU PASCA SERTIFIKASI
- * PENGEMBANGAN GENTENG KOMPOSIT BULU AYAM
- * MODEL PENDIDIKAN DESAIN PRODUK DALAM RANGKA MENGHASILKAN PRODUK KREATIF DAN PRODUK PATEN YANG BERCIRIKAN KEARIFAN DAN KEUNIKAN LOKAL
- * PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT UJI EMISI GAS BUANG KENDARAAN BEMOTOR
- * PENGARUH PUPUK KASCING DAN BOKASI TERHADAP KANDUNGAN GIZI SLADA DAN SAWI
- * TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH BATIK DENGAN METODE ELEKTROLISIS
- * PENGEMBANGAN ALAT TRANSPORTASI MODERN BERBIAYA MURAH, RAMAH LINGKUNGAN, MUDAH DIBANGUN DAN SARAT KOMPONEN LOKAL
- * PEMANFAATAN LIMBAH INDUSTRI KAPUK UNTUK PEMBUATAN BAHAN BAKAR ALTERNATIF BIODIESEL DENGAN PROSES TRANSTERIFIKASI
- * PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PEREMPUAN PENGRAJIN BATIK IMOIRI BANTUL
- * PEMANFAATAN PUISI ANAK SEBAGAI MEDIA MITIGASI BENCANA
- * MODEL PEMBERDAYAAN PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS KELEMBAGAAN LOKAL
- * STUDI PENGEMBANGAN KKN TEMATIK KEWIRAUSAHAAN DI SMK
- * PENINGKATAN PRODUKTIVITAS USAHA KERAJINAN KERAMIK DI DAERAH BANTUL GUNA Mendukung PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR NON MIGAS



Alamat Redaksi :
Kompleks Kepatihan - Danurejan
Yogyakarta 55213

Telp : 0274 - 562811 Psw. 1308
Fax : 0274 - 553156
E-mail : jurnallitbangdiy@gmail.com

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PEREMPUAN PENGRAJIN BATIK IMOIRI BANTUL

Oleh: Eny Kusdarini dan Setiati Widiastuti

ABSTRAK

Penelitian ini diadakan untuk mengetahui HKI yang melekat pada karya perempuan perajin batik Imogiri; identifikasi kendala-kendala yang ada dalam perlindungan HKI karya perempuan perajin batik Imogiri; serta identifikasi usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Subyek penelitian berjumlah tujuh orang dan ditentukan secara snow ball. Analisis data dilaksanakan adalah: analisis domain; analisis taksonomis; analisis komponensial; dan analisis tema.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa HKI yang dapat dipakai untuk melindungi karya perempuan perajin batik Imogiri adalah a) hak cipta; b) hak paten sederhana; c) hak merek; d) hak indikasi geografis. Namun ada beberapa kendala dalam perlindungan HKI perempuan pengrajin batik, yakni: a) terbatasnya pengetahuan dan pemahaman para perajin batik Imogiri tentang HKI; b) budaya kebersamaan (komunal) membuat para perajin sangat sulit menerima konsep-konsep HKI yang menonjolkan hak-hak pribadi; c) ketentuan-ketentuan dalam HKI yang bersifat komersial dan berorientasi pada keuntungan ekonomis tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki para perajin batik Imogiri; d) sulit dan mahalnyanya melewati prosedur pengajuan permohonan HKI.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual dalam hubungan antar manusia dan antar negara termasuk Indonesia merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Fakta ini merupakan konsekuensi dari keikutsertaan pemerintah Indonesia sebagai negara peserta perjanjian pembentukan WTO beserta perjanjian-perjanjian lain yang terkait dengan WTO, terutama yang terkait dengan perjanjian/konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Memang masalah HKI di satu sisi berkaitan dengan masalah liberalisasi ekonomi, dan di sisi lain berhadapan dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia masih berada dalam masa transisi masyarakat industrial yang belum semuanya mengerti dan memahami

masalah-masalah HKI yang sebelumnya tidak mereka kenal, karena HKI yang merupakan hak milik atas kekayaan intelektual memang bukan berasal dari masyarakat Indonesia, melainkan berasal dari masyarakat negara-negara maju untuk melindungi karya-karya intelektual mereka yang notabene pola pikir masyarakatnya berbeda dengan masyarakat Indonesia. Di samping itu memang keadaan ekonomi bangsa Indonesia yang masih berada jauh dari tingkat pendapatan perkapita masyarakat negara-negara maju, sehingga menyebabkan pemaknaan dan pemahaman tentang HKI pada sebagian masyarakat Indonesia juga masih mengalami berbagai persoalan. Terkait dengan pengaturan HKI seringkali masyarakat Indonesia terutama masyarakat industri kecil amat dirugikan akibat ketidaktahuan atau ketidakpahaman terhadap materi UU